ABSTRAK

KERJASAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) MELALUI *ASEAN NATIONAL POLICE* (ASEANAPOL) DALAM PENANGANAN TERORISME DI INDONESIA (2013-2016)

Muchlis Asani AlBanjari
44312704

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Jenjang Sarjana Strata-1
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Komputer Indonesia

Dalam mengumpulkan data-data, peneliti melakukan studi lapangan, studi pustaka, penelusuran *online* dan menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan narasumber. Sedangkan teknik untuk menganalisis data menggunakan triangulasi data.

Peneliti menganalisa beragam bentuk, upaya, Kendala Serta efektifitas kerjasama POLRI dalam ASEANAPOL dalam hal ini penulis menilai kerjasama yang ada adalah sebagai wadah bagi kepolisian se Asia Tenggara untuk menyalurkan pendapat serta solusi untuk memnangani Terorisme ataupun kejahatan lintas negara lain nya.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan memang berjalan dengan baik karena di adakan setiap setahun sekali secara rutin namun disamping itu kerjasama yang dilakukan ini masih dirasa kurang karena penulis sendiri sulit mendapat informasi akurat seperti pertukaran informasi yang dilakukan, data terorisme dari tahun ke tahun serta pertukaran personil yang tercantum dalam point forum ASEANAPOL.

Strategi diplomasi yang dilakukan POLRI maupun instansi terkait lainnya dalam forum ASEANAPOL atau biasa di sebut *joint communique* sangat diperlukan sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama. Diplomasi sangat berperan di dalam hubungan internasional. Upaya tersebut tentunya untuk menagntisipasi peneyebaran jaringan Terorisme agar tidak meluas. Tujuan akhirnya adalah mencapai kepentingan di bidang keamanan nasional dan menangani pelaku kejahatan terorisme yang melarikan diri ke negara ASEAN.

Kata Kunci : POLRI, ASEANAPOL, Terorisme, *Joint communique*, Diplomasi

ABSTRACT

The research method used in this research is qualitative method. In collecting data, researchers conducted field studies, literature studies, online search and purposive techniques to determine sources. While the technique to analyze data using data triangulation.

Researchers analyze various forms, efforts, constraints And the effectiveness of POLRI cooperation in ASEANAPOL in this case the authors assess the existing cooperation is as a container for the police throughout Southeast Asia to channel opinions and solutions to deal with Terrorism or other transnational crime.

From the results of the research, it can be concluded that the cooperation is done well because it is held every once a year on a regular basis but in addition to this cooperation is still felt less because the authors themselves are difficult to get accurate information such as the exchange of information conducted, the data of terrorism from year to years and personnel exchanges listed in the ASEANAPOL point forum.

Diplomacy strategy conducted by POLRI and other related institutions in ASEANAPOL forum or commonly called joint communique is very necessary as a means to reach mutual agreement. Diplomacy plays an important role in international relations. The effort is certainly to anticipate the spread of Terrorism network so as not to expand. The ultimate goal is to achieve the interests of national security and deal with the perpetrators of terrorist crimes who fled to ASEAN countries.

Keywords: POLRI, ASEANAPOL, Terrorism, Joint communique, Diplomacy

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Asia Tenggara memiliki potensi besar terhadap ancaman terorisme. Dilihat dari letak geografis negara di Asia Tenggara memberi jalan kepada penyebaran militant terorisme yang di permudah dengan penjagaan dan masih terfokusnya negara kawasan ini terhadap konflik perbatasan. Selain itu, beberapa negara di Asia Tenggara memiliki sejarah pergerakan yang kental dengan radikalisme bermotif agama, seperti halnya di Thailand yang eksistensi kelompok perjuangannya telah ada jauh sebelum peristiwa 9/11/2001 sebagai momentum menguatnya paradigma terorisme.

Dari sejumlah gerakan kecil terorisme di Asia Tenggara dapat dipahami bahwa gerakan ekstremis memang telah berakar sejak lama dalam lingkungan konflik, seperti misalnya konflik SARA di Indonesia , baik dengan symbol agama tertentu ataupun tidak. Hal seperti ini juga terjadi di Thailand dan Filipina, maupun negara Asia Tenggra lainnya. Hanya saja gerakan tersebut semakin terkontaminasi dengan pemikiran ala Timur Tengah yang berimplikasi pada peningkatan aksi terror. Negara Asia Tenggara diketahui sebagai kawasan perekrutan dan tempat pengoperasian jaringan terorisme internasional. Terdapat organisasi radikal yan di anggap sebagai organisasi terorisme yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris seperti Al-Qaeda. Diantaranya, *Jemaah Islamiyah (JI), Abu Sayyaf Group (ASG), Moro Islamic Liberation Front (MILF), dan Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM).* (Budi Winarno, 2014:189)

Berbagai upaya telah dilakukan ASEAN sebagai bentuk respon organisasi kawasan ini dalam memberantas terorisme pasca peristiwa 11/9 2001. Dalam lingkup kawasan, kerjasama sudah di jalin sejak terorisme menjadi isu global yang ditandai dengan semakin maraknya aksi terorisme diberbagai belahan dunia. Inisiatif kerjasama ASEAN di awali pada pertemuan kemendagri antar negara anggota ASEAN dengan mengeluarkan deklarasi ASEAN untuk aksi kejahatan lintas negara. Lalu dibentuknya pertemuan tingkat menteri untuk mengatasi kejahatan lintas negara (AMTC). AMTC diberi tugas untuk mengkoordinir aktivitas dengan badan lainnya.

Peristiwa 11/9/2001 semakin meningkatkan kebutuhan kerjasama kawasan . Komitmen ASEAN dalam menanggapi aksi *war on terrorism* dibuktikan dengan berbagai upaya melalui pertemuan, baik kerjasama bilateral maupun multilateral, yaitu pertama, menandatangani deklarasi bersama untuk memberantas terorisme (ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terorism) pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN 5 November 2001 di Brunei Darussalam. Kedua, menjalankan beberapa pelatihan perang bagi para petugas kepolisian dan inteljen, mendeteksi bahan bom, investigasi terorisme, keamanan bandara (dokumen perjalanan), masalah imigrasi, dan pengawasan di perbatasan. Ketiga, konferensi *ASEAN Chief of Police* (ASEANAPOL) yang diselenggarakan di Phnom Penh pada bulan mei 2002. Semua anggota ASEANAPOL memeiliki kemampuan secara efektif memonitor berbagai informasi dan memberantas segala bentuk kegiatan terorisme. Mereka sepakat untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum melalui berbagai pengalaman pada *counter-terorism* dan pertukaran informasi tentang dugaan terorisme, organisasi dan modus operandi. (Budi Winarno, 2014:192)

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang diatas pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : **"Bagaimana bentuk kerjasama POLRI melalui ASEANAPOL dalam penanganan terorisme di Indonesia ?"**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana Upaya POLRI dalam forum ASEANAPOL untuk menangani terorisme ?
2. Apa yang menjadi kendala kerjasama POLRI dalam ASEANAPOL terkait penanganan kasus terorisme ?

3. Bagaimana prospek dari pelaksanaan kerjasama yang di lakukan POLRI dalam ASEANAPOL terkait penanganan terorisme ?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis membatasi masalah kerjasama keamanan antara POLRI dalam ASEANAPOL untuk menangani masalah terorisme di Indonesia yaitu pada tahun 2013 - 2016. Terorisme di Indonesia sendiri mengalami pasang surut dalam periode tersebut di awali dengan sekitar 12 aksi teror di sepanjang 2013 hingga yang terakhir ialah tragedi bom sarinah di tahun 2016 lalu. Terjadi beberapa pertemuan ASEANAPOL yang ke 33 di Thailand, pertemuan ke 34 di Filipina hingga pertemuan ASEANAPOL tahun 2015 - 2016 dimana pada periode ini Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ASEANAPOL yang ke-35 dan POLRI menjadi ketua dari ASEANAPOL dimana terdapat 14 nota kesepahaman yang di setujui oleh para negara anggota. Juga POLRI menekankan banyak hal yang di tuangkan dalam *join communicated*. Salah satu nya Terorisme, menurut POLRI kasus lintas negara tidak bisa ditangani sendiri sehingga diperlukan kerjasama dalam penyelesaian kasus dan membuat penanganan kasus menjadi efektif. Kejahatan di Indonesia adalah kejahatan juga di negara lain.. Karena itu kerjasama dengan ASEANAPOL tersebut yang mereka tingkatkan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana kerjasama yang dilakukan POLRI dengan ASEANAPOL terkait kejahatan lintas negara khususnya di ASEAN. Dengan maksud tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama POLRI melalui ASEANAPOL dalam penanganan terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sikap POLRI dan ASEANAPOL terkait terorisme yang terjadi di Indonesia
3. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kerjasama POLRI dalam ASEANAPOL yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ke belakang ini.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni kerjasama yang dilakukan POLRI dengan ASEANAPOL dan keterkaitan nya terhadap penanganan terorisme khususnya di Indonesia sendiri. Oleh karena itu, secara khusus tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai beikut :

1. Kegunaan Akademik
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional pada khususnya dan para pemerhati masalah-masalah internasional pada umumnya mengenai kerjasama kemitraan seperti yang diangkat oleh penulis.
2. Kegunaan Praktis
   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan menyangkut kerjasama kemitraan

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Hubungan Internasional

Studi hubungan internasional menjadi landasan utama dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu kajian yang mempelajari mengenai cara mengidentifikasikan seluruh bentuk interaksi yang dilakukan oleh suatu aktor-aktor baik itu bersifat individu maupun kelompok yang berdasarkan negara dan lintas batas negara. Sifat dari hubungan internasional yaitu interdisipliner dan heterogen dimana dalam pengkajiannya memerlukan berbagai macam kajian ilmu lainnya untuk menentukan interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor negara dan non-negara tersebut.

Interaksi yang dilakukan sebagai salah satu fokus dalam kajian studi hubungan internasional sehingga pada disiplin ilmu hubungan internasional yang bersifat interdisipliner pada beragam bidang-bidang yang dikaji mencakup banyak hal seperti: politik internasional, ekonomi internasional,

hukum internasional, organisasi internasional, diplomasi, analisis politik luar negeri, studi strategis, konflik dan perdamaian hingga pada ekonomi politik internasional. Sehingga bila isu-isu baru bermunculan pada suatu masa maka isu tersebut akan dimasukkan dalam studi hubungan internasional sebagai kajian yang baru(Ambarwati dan Subarno Wijatmadja, 2016:7).

2.2 Kerjasama Keamanan

Kerjasama keamanan biasanya dapat dipahami sebagai kolaborasi diantara negara-negara yang bersengketa, kemudian kerjasama keamanan dilakukan untuk menangkis ancaman.Kerjasama keamanan mengisyaratkan untuk mengendalikan tujuan penting, keberlangsungan hidup bangsa, pada sumber daya, niat dan kegiatan negara-negara lainyang sulit untuk didamaikan dengan alasan keamanan yang dijamin menolong kepentingan keamanan negaranya untuk mengatasi konflik.Negara-negara yang memilih kerjasama keamanan mengorbankan aset keamanan mereka untuk mendapatkan keamanan yang lebih tinggi dengan memperoleh aset lain yang mereka percaya dapat membantu mereka untuk menyediakan keamanan mereka dengan lebih baik (Clarsnaes, Risse & Simmons,2013 : 762-763).

2.3 Perjanjian Internasional

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya interdependensi antara umat manusia di dunia inimendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional.Perbedaan dalam falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan dan lain- lain tidak menjadi faktor penghalang utama untuk mengadakan hubungan atau kerjasama. Peraturan dalam bentuk perjanjian internasional memang lebih menjamin kepastian hukum dan kejelasan sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan dan kejelasan para pihak. Peranan perjanjian internasional merupakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan internasional (Parthiana 2002 : 2-3).

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam permasalahan terorisme dibutuhkan suatu penangan khusus yang menyertakan kolaborasi antar negara untuk kesuksesan penyelesaian suatu masalah bersama. Seperti yang di kemukakan oleh kaum Liberalis, bahwa dalam politik dunia adanya ancaman yang dihadapi bersama oleh negara-negara akan mendorong mereka untuk merumuskan collective action atau aksi bersama meskipun pada saat yang sama mereka tetap sensitif dengan kepentingan nasional masing-masing. Karena itu para penstudi politik global menggunakan pemikiran liberalisme, dalam pandangan liberalisme negara bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri tetapi instrumen kelembagaan yang di bentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan hidup bermasyarakat.

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang akan di jalankan, sekumpulan kebijakan yang di hasilkan di dalam politik luar negeri mencerminkan situasi domestik yang terefleksikan ke dalam politik luar negeri, seperti apa yang telah di kemukakan oleh Lentner. Hal ini termasuk dalam hubungannya dengan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi isu kejahatan lintas negara, yaitu terorisme.

Adapun salah satu model perjanjian internasional kepolisian *(international police agreement model)*, baik melalui berbagai perjanjian bilateral maupun multilaral dengan negara di kawasan regional maupun global, baik pertemuan regional maupun international dan melakukan perjanjian kerjasama. Perjanjian internasional Polri ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan hubungan dan kerjasama.kegiatan tersebut seperti ASEANAPOL *(ASEAN Association of Chiefs of Police)* forum (yang ke-35 ba berlangsung di Jakarta pada 3-7 Agustus 2015 lalu).

III. Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Bentuk Kerjasama POLRI Melalui ASEANAPOL Terkait Terorisme

Adapun salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu implementasi e-ADS Di Indonesia yang di paprkan sebagai berikut :

1. Perluasan e-ADS

a) Sejak 2006, Indonesia telah memperluas e-ADS ke Kepolisian Daerah dan beberapa Lembaga Penegakan Hukum.
b) Indonesia akan memperluas sistem ke Badan Imigrasi untuk memanfaatkan database SLTD di tahun depan. Polisi Nasional Indonesia masih berkoordinasi dengan Imigrasi untuk melaksanakan ekspansi tersebut.

2. Pelatihan
a) Hingga 2016 Indonesia telah mendapatkan 36 akun pelatihan pengguna (sebelum 27 akun) oleh System Administrator Singapura untuk mendukung pelatihan lanjutan bagi pengguna baru atau untuk pelatihan penyegaran.
b) Indonesia telah melakukan pelatihan Penyegaran e-ADS pengguna pada tanggal 10 sampai 12 Mei 2016.

3. Pengguna
a) Saat ini, Indonesia memiliki 87 akun pengguna untuk skrining lokal, termasuk 26 akun pengguna untuk skrining luar negeri untuk akses dan penggunaan e-ADS.
b) NCB Jakarta memiliki 6 pengguna termasuk administrator dan dua pengguna dari masing-masing 31 Polda. Jumlah total pengguna adalah 87 pengguna.

Sumber : Dokumen ASEANAPOL Data Country Report C, hal 2

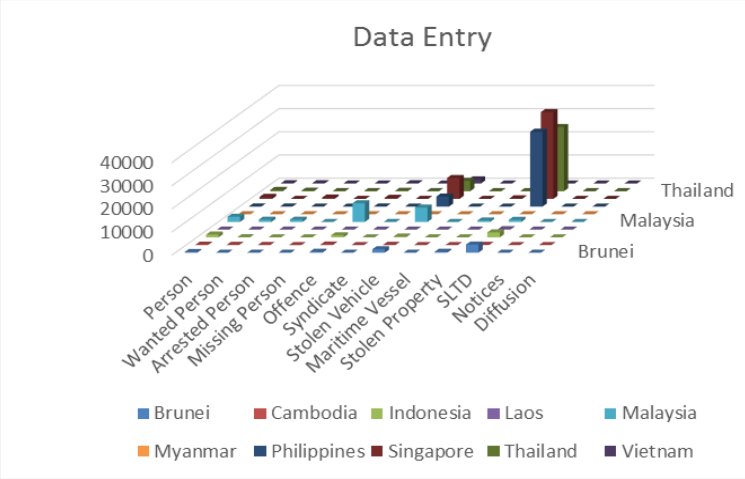
4. Jaringan dan Platform
a) Saat ini Indonesia memiliki bandwidth 10 Mbps untuk akses internet termasuk 1 Mbps yang digunakan untuk e-ADS (I-24/7 Interpol Network). Pada bulan Juli 2015, Indonesia melakukan beberapa uji akses bersamaan dengan STEISS mengenai platform kompatibilitas baru (MS Windows 8), dan hasilnya sangat berhasil.
b) Indonesia menyarankan untuk meningkatkan platform kompatibilitas yang lebih tinggi yaitu MS Windows 10 dan IE versi 12 atau lebih.

Penggunaan e-ADS di Indonesia 2013 sampai April 2016, sebagai berikut

Data Usage of 2016 (until April)

1. Data Entry e-ADS

Berikut ini adalah gambar data yang masuk melalui e-ADS dari setiap negara anggota ASEANAPOL :



Sumber : Dokumen ASEANAPOL country report C, Page 3

Gambar 3.1
Data Entry e-ADS

Dari gambar tersebut kita dapat melihat kita dapat melihat perbandingan yang signifikan dimana data yang masuk melalui e-ADS di dominasi oleh 3 negara anggota saja yaitu Singapore, Thailand, dan Philipines. Bisa di artikan bahwa tidak semua negara yang tergabung dalam ASEANAPOL ini memaksimalkan penggunaan e-ADS termasuk Indonesia. Bahkan ada negara yang sama sekali tidak memanfaatkannya nya seperti Cambodia, Laos dan Myanmar.

2.Search e-ADS

Berikut adalah hasil searching melalui e-ADS :

Country	Successful search count with hits	Total search count
Brunei	5176	5963
Cambodia	530	770
Indonesia	5842	8956
Laos	81	210
Malaysia	10982	13696
Myanmar	381	804
Philippines	212	301
Singapore	10894	16166
Thailand	1102	1912
Vietnam	634	1065

Sumber : Dokumen ASEANAPOL Country Report C, Page 4

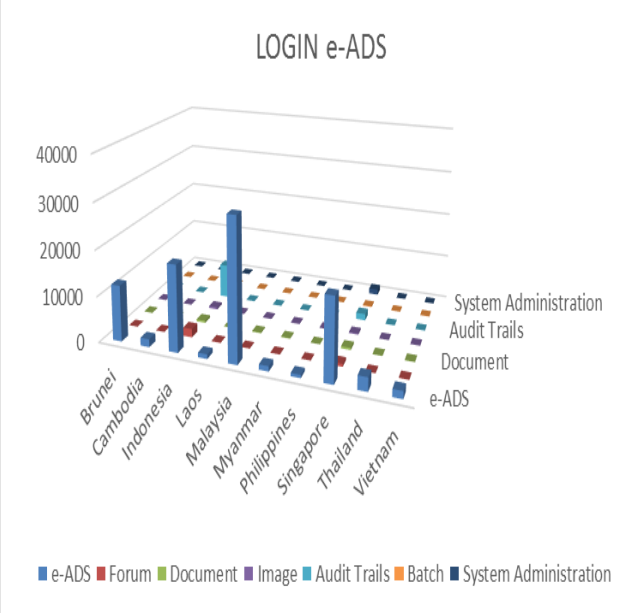
Tabel 3.1
Search e-ADS

Dari table berikut kita bias melihat hasil search yang dilakukan oleh negara anggota

ASEANAPOL dimana ada empat negara yang dominan dalam melakukan pencarian baik dari *successful search count with hits* maupun total search count yaitu Singapore, Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Sementara ada empat negara juga dengan total penelusuran terendah bahkan di bawah 1000 pencarian yaitu Laos, Philippines, Myanmar, dan Cambodia.

3.Login

Berikut adalah gambar akses masuk negara anggota yang tergabung dalam e-ADS :



Sumber : Dokumen ASEANAPOL Country Report C, Page 5

Gambar 3.2
Login e-ADS

Dari grafik tersebut terlihat perbedaan ang siignifikan dari setiap negara anggota yang mengakses masuk ke dalam jaringan e-ADS dimana Malaysia ada di urutan teratas login e-ADS di ikuti Singapore, Indonesia, dan Brunei. Dan negara yang paling sedikit melakukan login e-ADS ialah Cambodia, Philippines, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Thailand dengan rata – rata jauh di bawah brunei dengan 10000 kali akses masuk.

3.2 Upaya POLRI Melalui ASEANAPOL Terkait Terorisme

Kejadian terror yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia merupakan salah satu target operasi organisasi terorisme baik Internasional maupun domestic. Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan pengamatan yang lebih cermat, kondisi masyarakat dan stabilitas politik pemerintahan. Ketiga factor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas dalam upaya menangani terorisme. Konsep barat dan negara Islam mengenai definisi terorisme sangat sulit di terima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara yang berbasis Islam bebrbeda secara mendasar baik dari segi latar belakang maupun perkembangan yang terjadi di Indoneisa.

3.3 Kendala POLRI Melalui ASEANAPOL Terkait Terorisme

Kendala yang di hadapi tentu saja perkembangan terorisme global saat ini menjadi bergejolak setelah ISIS / ISIL / IS menyatakan dirinya sebagai Khilafah Islam dengan Abubakar Al-Baghdadi sebagai Khalifah. Efek dari deklarasi tersebut menyebar ke seluruh dunia dan dengan segera mendapat pengakuan. Kampanye ISIS dilakukan melalui berbagai media, termasuk media maya dengan menyerukan "jihad" untuk mendukung pembentukan Khilafah Al-Baghdadi, telah mengundang FTF (pejuang teroris asing) dari seluruh dunia menuju ke Syria dan Irak untuk berperang dan membela negara-negara tersebut, yang mana ini membuat masalah bagi banyak negara dan menjadi isu internasional. Diperkirakan lebih dari 20.000 orang yang telah bergabung dengan FTF-ISIS dalam setahun terakhir, jauh lebih besar dari FTF yang bergabung dalam konflik Afghanistan mencapai 20.000 orang selama periode sepuluh tahun. Pengaruh kehadiran ISIS di tingkat regional dapat diidentifikasi dengan munculnya undangan untuk bergabung dengan ISIS melalui Cyberspace dan dengan keberangkatan sejumlah orang berusaha ke Suriah dan Irak. Hal ini telah menjadi ancaman bagi kawasan Indonesia maupun Asia Tenggara. Deklarasi ISIS menerima kelompok radikal lokal untuk menyatakan dukungan dan kesetiaan, hal ini dapat mempengaruhi peningkatan radikalisme di negara Indonesia. Berikut adalah tabel perkembangan pergerakan ISIS :

Tabel 3.2
Emerging Threat Of ISIS 2013-2016

Has departed from Indonesia	**215**
Plan to depart from Indonesia	**60**
Has returned to Indonesia	**28**
Died in Syria	**41**
Foiled	**97**
ISIS foreigners who enter Indonesia	**9**
Suspected to have left for Syria	**11**

Sumber : Dokumen A INP Country Report ASEANAPOL, hal15

Selain perkembangan terorisme persoalan implementasi e-ADS di Indonesia pun menjadi salah satu kendala terhitung 2013 sampai 2016, yaitu :

a) Sampai saat ini e-ADS tidak digunakan secara efektif dan optimal. Hal ini dapat dilihat pada data di atas bahwa kemajuan pemakaiannya terlalu lambat. Tapi sama seperti di semua negara anggota
b) Konektivitas akses jaringan e-ADS terlalu lambat. Waktu akses membutuhkan waktu lebih dari 2 menit. Hal tersebut membuat pengguna menjadi bosan dan lebih senang menggunakan INTERPOL System I-24/7.
c) Informasi dalam sistem e-ADS hampir sama deng an sistem I-24/7. Informasi dan data tentang e-ADS harus lebih spesifik mengenai kejahatan yang terjadi di kawasan ASEAN, tidak sesuai dengan data yang ada pada I-24/7, sehingga pengguna hanya merasakan data yang dibutuhkan dan dapat ditemukan di hanya e-ADS
d) Indonesia mengusulkan untuk membuat modul dalam sistem pelaporan atau modul informasi e-ADS untuk memasukkan data Identifikasi Korban Bencana (DVI) untuk berbagi data antar negara anggota Aseanapol.
e) Sehubungan dengan biaya pemeliharaan tahunan berbagi meningkat setiap tahun, Indonesia menyarankan agar Singapura sebagai Pemimpin Konsorsium dan Sekretariat ASEANAPOL untuk mencari sponsor guna meringankan negara-negara anggota untuk membayar biaya perawatan tahunan, sebagai solusi untuk tidak membebani anggota countires.
f) Mengingat penggunaan e-ADS tidak optimal, Indonesia mengusulkan agar pertemuan tersebut harus mencari solusi baik membangun database baru berbasis cloud computing dengan data spesifik ASEAN dan berbeda dengan data Interpol.
g) Sekretariat ASEANAPOL telah diresmikan hampir 10 tahun yang lalu, sekarang saatnya untuk memberikan mandat yang lebih besar kepada Sekretariat ASEANAPOL untuk mengelola forum ASEANAPOL ini baik operasional maupun administratif, termasuk dalam mengelola sistem pertukaran informasi di antara negara-negara anggota ASEANAPOL.

Sumber : wawancara AKBP Hendy Sukoco S.H.,S.Hum Konvinter Set NCB Interpol

3.4 Prospek Kerjasama POLRI Melalui ASEANAPOL

Baru-baru ini, terasa bahwa globalisasi tersebar di seluruh dunia, di kawasan ASEAN tentunya. Era globalisasi membawa dampak positif dan negatifnya. Hal ini juga mampu menciptakan tren baru kejahatan, pada kejahatan ekonomi atau dimensi baru kejahatan. Dalam kondisi ini, beberapa negara kehilangan kemampuan penyidik untuk menghadapi dimensi baru kejahatan dan kejahatan transnasional. Mereka mencoba meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil kepolisian mereka, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak mudah dan bukan cara sederhana untuk

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personil polisi dan untuk mengubah citra Polisi Nasional Indonesia yang memiliki jumlah besar di kawasan ASEAN namun Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melakukan upaya serius untuk mendapatkan tujuan.

Di jalur ini dan tidak diragukan lagi, kerja sama pertukaran dan program pelatihan sangat dibutuhkan, terutama di kawasan ASEAN. Metode pertukaran pengalaman yang dilakukan melalui seminar, workshop, pelatihan bersama dll masih belum optimal dalam meningkatkan kemampuan penyidik. Peningkatan dimensi baru kejahatan dan modus operandi menyebabkan para peneliti selalu memperkuat kemampuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan di dalam negeri atau di luar negeri. Undang-undang no 2 tahun 2002 Pasal 32 dan 33 telah memberikan dasar bagi Polri untuk melakukan kerjasama dengan lembaga nasional maupun luar negeri. Berdasarkan undang-undang ini, sebuah kerjasama melalui pertukaran personil dan melakukan program pelatihan bersama dengan pasukan polisi lainnya untuk memperbaiki kapasitas dalam memberantas kejahatan.

POLRI telah mengirim petugas ke berbagai negara di dunia untuk mengikuti berbagai pelatihan atau pendidikan. Sebagian besar pelatihan dan pendidikan di bidang investigasi, anti teror dan bidang lainnya. Upaya ini telah diuntungkan oleh Polri atas kontribusinya. Selain meningkatkan kemampuan melalui pusat pendidikan dan pelatihan, juga menjadi keuntungan eksklusif bagi perwira itu sendiri dalam rangka promosi.

Ada beberapa pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diadakan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personil polisi di seluruh dunia dan juga di kawasan ASEAN. Kursus atau pelatihan di negara-negara ASEAN seperti JASPOC, Staf dan Komando, Kursus Komando Senior, kursus singkat di JCLEC-Indonesia, SEART-Malaysia, ILEA-Bangkok, SPF Singapura, dll. Secara berkala, INP mengundang siswa dari negara lain untuk Memiliki Staf dan Komando di Bandung. Sementara pelatihan telah dilakukan melalui jalur ASEAN, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan petugas kepolisian di ASEAN. Ini adalah Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta (JCLEC), yang berada di kompleks Akademi Polisi Polri di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, yang mendapat dukungan dari Australia, Negara-negara Eropa dan lainnya. Sebagian besar program di JCLEC adalah program penegakan hukum mengenai terorisme seperti Manajemen Internasional untuk Kejahatan Berat (IMOSC), Analisis Pasca Ledakan, Organisasi Teroris dan Kursus Operasi, Rapat Kelompok Kerja untuk Penegakan Hukum, Manajemen Insiden Kritis, dan Pelatihan Investigasi Keuangan, Investigasi Lingkungan Pelatihan, Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen, Kursus Surveillances, Identifikasi Polisi Korban Bencana, Kursus Investigasi Narkoba Transnasional, Program Investigasi Penyelundupan Manusia Satuan Tugas, Kursus Investigasi Manajemen Senior, yang memerangi Kejahatan Terorganisir Transnasional, ASEAN Mengintegrasikan Lokakarya Kemampuan Keimigrasian dan lain sebagainya.

Sumber : Dokumen ASEANAPOL Country Report C, hal 13

Untuk memperbaiki dan mengembangkan personil, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menawarkan berbagai program melalui Staf dan Komando di Bandung, Jawa Barat. Setiap negara didorong anggotanya untuk mengikuti pelatihan di negara lain. Tujuan dari program ini bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan mereka, tapi juga mengenal sistem budaya, pemerintahan dan kepolisian negara lain untuk meningkatkan kerja sama antar angkatan kepolisian di masa depan dan juga untuk membangun jaringan yang baik di antara Kepolisian ASEAN. Program Staf dan Komando ini juga menawarkan kepada Polisi Internasional lainnya di luar Polisi ASEAN seperti Arab Saudi, Timor Leste, Mozambik, Papua Nugini, Australia, Fiji dll. Pada tahun 2014, INP juga mengirim satu petugas untuk bergabung dengan *"Command Course Advance 38th"* di *Police College Royal Thai Police* dan satu petugas untuk bergabung dengan *"Command*

Course" di Kepolisian Singapura sekaligus satu petugas untuk bergabung dengan Perintah Komando Polisi Senior Internasional di Royal Malaysia Perguruan Tinggi Kepolisian. Setiap tahun INP menyediakan beberapa kursi bagi Polisi ASEAN untuk mengikuti Kursus Staf dan Komando di Bandung. Selama tahun 2004-2014, 19 petugas dari anggota ASEANAPOL telah mengikuti kursus tersebut.

Sumber : Dokumen ASEANAPOL Country Report C, hal 15

No	Year	Quantity	Origin Country
1.	2004	1	Singapore
2.	2005	3	Brunei, Singapore, Cambodia
3.	2006	2	Singapore, Cambodia
4.	2007	1	Singapore
5.	2008	1	Singapore
6.	2009	4	Brunei, Singapore, Cambodia, Malaysia
7.	2010	1	Brunei Darussalam
8.	2011	1	Singapore
9.	2012	2	Singapore, Malaysia
10.	2013	2	Singapore, Malaysia
11.	2014	1	Singapore
12.	2015	1	Singapore
13.	2016	1	Singapore

Tabel 4.3
ASEANAPOL Members Student Officers at the INP Staff and Command Course Period of 2004-2016

Sumber : Dokumen ASEANAPOL Country Report C, hal 14

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1Kesimpulan

Dari segi Kerjasama Indonesia perlu melihat kembali hubungan kerjasama diplomasi dalam hal penanganan terorisme internasional maupun transnasional. Karena banyak sekali kasus terorisme yang di lakukan Warga Negara Indonesia maupun asing tidak terselesaikan kasusnya dikarenakan tidak ada hubungan kerja sama diplomasi dalam menangani kasus tersebut atau dengan kata lain tidak adanya kesepakatan yang kongkrit dengan negara lain khususnya di Asia Tenggara. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali untuk terus menjalin hubungan dengan negara lain khususnya Asia Tenggara.

Dalam hal upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan pengamatan yang lebih cermat, kondisi masyarakat dan stabilitas politik pemerintahan. Ketiga factor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas dalam upaya menangani terorisme. Konsep barat dan negara Islam mengenai definisi terorisme sangat sulit di terima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara yang berbasis Islam bebrbeda secara mendasar baik dari segi latar belakang maupun perkembangan yang terjadi di Indoneisa.

Dalam hal kendala selain isu terorisme yang menjadi masalah yaitu ISIS ternyata dalam implementasi penggunaan e-ADS baik di Indonesia maupun negara anggota ASEAN tampaknya belum efektif salah satunya adalah dilihat dari data login, search, dan data eentry dimana hanya di dominasi oleh negara yang terbilang mumpuni dalam bidang IT yaitu Singapore.

Dan dari prospek memang kerjasama berjalan dengan baik karena di adakan setiap satu tahun sekali namun di samping itu masih ada kekurangan dari berbagai aspek baik itu politik, sosial, teknologi, ekonomi maupun implementasi penanggulan nya untuk itu perlu di tingkatkan lagi agar kerjasama yang dilakukan menuai hasil yang sesuai dengan harapan apalagi isu terorisme merupakan isu yang sangat perlu untuk di atasi demi menjaga keamanan serta kestabilan di suatu negara terutama Indonesia. Karena apabila terorisme tidak bisa di atasi dengan baik maka tidak akan

ada yang mau berkunjung ke negara tersebut tentunya dengan alasan jaminan keselamatan.

4.2 Saran

Adapun saran dari penulis terkait penanganan terorisme di Indonesia oleh POLRI dalan Forum ASEANAPOL, yaitu:

1. Semakin pesatnya era globalisasi yang terjadi maka semakin pesat pula teknologi yang tetntunya menjadi sala satu pemicu adanya tindak terorisme dengan menggunakan cara yang baru. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi POLRI tentunya Divhubinter dan instansi terkait lainnya dalam rangka memberantas tindak terorisme baik internasional maupun transnasional.
2. Penulis memberi saran bagi para peneliti yang mungkin akan melanjutkan penelitian mengenai Kerjasama POLRI dalam ASEANAPOL ini untuk lebih berfokus pada point-point yang tercantum pada *joint comunique* terutama dalam hal bentuk kerjasama seperti pertukaran informasi, pertukaran personil, serta data terorisme yang terjadi dari tahun ke tahun. Karena penulis sendiri kurang mendapat info ataupun data yang nyata dalam penelitian ini sebab ASEANAPOL sendiri tidak berfokus di terorisme saja melainkan banyak sekali kejahatan lintas negara yang dibahas di forum ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ambarwati dan Subarno Wijatmadja. 2016. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Malang:Intrans Publishing.

Buzan, Barry dan Lene Hansen. 2009. *The Evolution Of Internasional Security Studies*. New York: Cambridge.

Carlnaes, Walter, Rise, Thomas & Simon, A Beath. 2013 *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung. Nusa Media.

Hettne, Bjorn dan Fredrik Soderbaum. 2008. "The Future of Regionalism: Old Divides, New Frontiers" dalam Regionalisation and Global Governance: the Taming of Globalisation?

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010)

Kajsa Ji Noe Oest, *The End of Alliance Theory?*, Institut for Statskundskab, Copenhagen, 2007

M. Rajendran, *ASEAN Foreign Relations The Shift to Collective Action*, Kuala Lumpur : Arena Buku sdn.hbd, 1985

Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan FungsiDalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Binacipta, 1997),

Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasiona*l. Bandung: Mandar Maju.

Paul Wilkinson, "Terrorism and The Liberal States", (London: The Macmillan Press Ltd, 1977).

Perwita, Anak Agung Banyu, Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Ralf Emmers, The securitization of transnational crime in ASEAN, 2002

Rudy, Teuku May. 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Rudy, Teuku May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*. Bandung: PT. Refika Aditama

Rudy, Teuku May. 2005. *Administrasi & Organisasi Internasional.*Bandung: Refika Aditama

Vermonte, Philips Jusario, Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya, dalam Analisis CSIS Isu-isu Non Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan, Jakarta: CSIS, 2002.

Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

DOKUMEN

A INP - Country Report ASEANAPOL

B INP - Country Report ASEANAPOL

C INP - Country Report ASEANAPOL

The 33th ASEANAPOL Joint Coummunique, Pattaya, Thailand 2013

The 34th ASEANAPOL Joint Communique, Manila, Philipines 2014

The 35th ASEANAPOL Joint Communique, Jakarta, Indonesia 2015

The 36th ASEANAPOL Joint Communique, Kuala Lumpur, Malaysia 2016

JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Bima. Andrianto P, *Kerjasma Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam ASEAN National Police (ASEANAPOL) Untuk Menangani Terorisme Di Indonesia Periode 2002-2006*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016, hal. 1- 10

Muh. Ardhan Arwin, *Peran Interpol Indonesia Di Wilayah Regional ASEAN*, Universitas Hasannudin Makassar 2013

Yani. Yanyan M, dkk, *Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara - Negara Anggota ASEAN Dalam Kerangka ASEAN SECURITY COMMUNITY, 2012*, Vol. 1- 2

RUJUKAN ELEKTRONIK

ASEAN *Political Security*: (http://www.asean.org/15060.html) di akses pada 10 April 2017

ASEAN Selayang Pandang: (www.kemlu.go.id/Documents/ASEAN/ASP_2012_Edisi_20.pdf) di akses pada 10 April 2017

Indarini Nurvita, *Terorisme sebagai fenomena globalisasi di Asia Tenggara dan Asia Timur*, makalah dipaparkan pada Internasional Symposium 2009, (https://akupunmenulis.wordpress.com/2010/02/01/terorisme-sebagai-fenomena-globalisasi-di-asia-tenggara-dan-asia-timur/) diakses pada 11 April 2017

Isu Keamanan Internasional : (www.GlobalSecurity.org, 2011) di akses pada 11 April 2017

Kasus Terorisme 2013 : (http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/27/polri- tangani-12-kasus-terorisme-selama-2013) di akses pada 21 April 2017.

Konferensi ASEANAPOL ke 33 Pattaya : (http://www.interpol.go.id/id/berita/532-konferensi-aseanapol-ke-33- di-pattaya-thailand) di akses pada 10 April 2017

Konferensi ASEANAPOL ke 34 Manilla: (http://www.interpol.go.id/id/berita/638-asean- perkuat-kerja-sama-kepolisian-melalui-konferensi-aseanapol-ke-34) di akses pada 10 April 2017.

Komitmen ASEANAPOL meminimalisir tingkat kejahatan : (http://kriminalitas.com/aseanapol-dan-zero-crime-di-asean/) di akses pada 10 April 2017

Kerjasama Keamanan DI ASEAN : http://www.aseansec.org/16557.html di akses 10 April 2017

Nota kesepahaman POLRI dengan ASEANAPOL : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150806192220-12-70563/aseanapol-hasilkan-14-kesepakatan-kerjasama-negara-asean/) Di akses pada 10 April 2017

Pasang Surut Terorisme : (http://beritatrans.com/2015/02/24/pasang-surut- terorisme-di- tanah-air/) Di akses pada 21 April 2017

Pernyataan Kapolri : http://www.suara.com/news/2017/04/08/131128/kapolri- teroris- bunuh-orang-lain-atas-nama-tuhan) di akses pada 29 April 2017

Sejarah pembentukan dan tugas ASEANAPOL :(www.aseanapol.org) di akses pada 11 April 2017

Sukma, Rizal CSIS, *The future of ASEAN : Towards a security community*, makalah diseminarkan pada ASEAN Coorportion : Challenges and Prospects in the current international situation, New York, 3 Juni 2003,http://www.indonesiamissionny.org/issuebaru/mission/ASEAN/pape r.rizal

sukma. PDF diakses pada 11 April 2017
Teorisme di akhir 2015 : (http://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/ancaman- teror-di-akhir-2015-indonesia-siaga-satu_567b86bf62afbdac111098b6) Di akses pada 21 April 2017